

Buletin

# INF BPPSDMP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

Edisi Januari 2016



**GERAKAN PEMBERDAYAAN  
PETANI TERPADU TONGGAK BARU  
MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN**



[humassdm@gmail.com](mailto:humassdm@gmail.com)



[bppsdp.deptan.go.id](http://bppsdp.deptan.go.id)



021-7804257



[humassdm.blogspot.com](http://humassdm.blogspot.com)

# Salam Redaksi



**Dr. Ir. Momon Rusmono, MS**  
Sekretaris Badan PPSDMP

Salam hangat dan salam sejahtera bagi para pembaca yang setia mengikuti perkembangan informasi dan berita yang disajikan oleh Buletin "Info BPPSDMP". Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada tahun 2016 ini kita telah memasuki tahun ketiga penerbitan Buletin "Info BPPSDMP" dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan sajian informasi terbaru dan berita seputar program/kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Buletin "Info BPPSDMP" yang ditujukan kepada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, UPT lingkup BPPSDMP, Satker Dana Dekonsentrasi dan lembaga yang terkait, diharapkan mampu menjadi media publikasi yang bersifat aktual dan informatif guna mendukung kinerja BPPSDMP baik secara eksternal maupun internal.

Pada edisi awal Tahun 2016 sebagai Headline kami menyajikan berita mengenai "Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu Tonggak Baru Mewujudkan Kedaulatan Pangan". Untuk rubrik lainnya kami juga menyajikan berita kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing pusat lingkup BPPSDMP. Kami selalu mengharapkan dukungan, saran serta masukan dari segenap pihak untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Buletin ini.

Semoga buletin "Info BPPSDMP" Edisi Bulan Januari tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah informasi serta pengetahuan para Pejabat/Staf Lingkup BPPSDMP pada khususnya, dan Pejabat/Staf lingkup Kementerian Pertanian pada umumnya.

## INFO BPPSDMP

### Editorial

#### PENASEHAT

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

#### DEWAN PEMBINA

Sekretaris Badan PPSDMP  
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian  
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian  
Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

#### PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

#### REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Sub Bagian Humas

#### DEWAN REDAKSI

Eko Saputra, Marresya Dessilvia, Tri Harno, Festi Agustiani

#### DESIGN GRAFIS

Daimatus Pito Banugroho

#### DISTRIBUSI

Emalatuconsina

#### ADMINISTRASI

Deti Ugi Rustini, C. Sulistyow

#### PENERBIT

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

#### KANTOR REDAKSI

Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D. Lt. 7. Jl. Harsono RM  
No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, Kode Pos  
7214/JKSPM, Telp. 021 7804257, Email  
humassdm@gmail.com

## DAFTAR ISI



#### Head Line



**"GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU  
TONGGAK BARU MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN"**

#### PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN DAN PENGEMUDI

#### Info Penyuluhan



Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPTT)  
Optimalisasi Peran Penyuluhan Dalam Pendampingan  
Program Swasembada Pangan di Tingkat BP3K dan WKPP

#### Info Sekretariat



#### Info Pendidikan

### STPP MALANG

Lembaga pendidikan Pertanian dengan Sistem Pendidikan  
"Credit Earning System" (CES) dan pola pembelajaran  
"In and Out Campus Learning System".



#### Info Pelatihan



**"ON THE JOB TRAINING (OJT),  
PILIHAN STRATEGIS SUKSESAN GPPT"**



## “GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU TONGGAK BARU MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN”



**G**erakan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi akan terus bergulir sejalan dengan semangat gerak dan etos para petani di Indonesia, kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pending Dadih Permana.

Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lanjutnya merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menggugah kembali semangat semua pihak agar peduli dan bekerja bahu membahu dalam meningkatkan martabat petani sebagai pelaku utama mewujudkan kedaulatan pangan. “Dengan didukung oleh seluruh unsur penting yaitu penyuluh pertanian, mahasiswa dan bintang pembina desa (babinsa) diharapkan mampu menggerakkan para petani dalam mencapai

keberhasilan program”, jelasnya.



Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan melalui penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani baik poktan dan gapoktan, kelembagaan ekonomi petani atau badan usaha milik petani dalam bentuk koperasi pertanian yang didampingi dan dikawal oleh penyuluh secara teratur, sistematis dan berkelanjutan serta dibantu mahasiswa melalui sistem kerja latihan-kunjungan dan supervisi yang berbasis di BP3K sebagai rumah para petani untuk meningkatkan adopsi petani dalam memanfaatkan teknologi unggulan dan modern untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani.



## Mewujudkan Nawacita

Menurutnya salah satu tantangan pembangunan pertanian adalah bagaimana mencapai pemenuhan kebutuhan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, serta peningkatan ekspor produk pertanian. Untuk itu perencanaan pembangunan pertanian ke depan harus dilandasi optimalisasi sumberdaya yang sifatnya terpadu.

Sektor pertanian juga dihadapkan pada beberapa kendala menghadapi tahun 2015 – 2019, antara lain berupa: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (*losses*), dan (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi. Ditambah lagi dengan tantangan perekonomian di era globalisasi ini yang masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana mewujudkan subjek dari perekonomian Indonesia yaitu penduduk Indonesia menjadi sejahtera.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, Presiden RI telah menetapkan pencapaian Swasembada Berkelanjutan padi, jagung dan swasembada kedelai serta di tahun 2016 ditambah dengan komoditas cabai, bawang merah, tebu dan daging sapi melalui program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas.

Tertuang dalam amanah NAWACITA untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang bertujuan agar Indonesia sebagai bangsa

dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat yaitu: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Kementerian Pertanian mempunyai andil yang sangat penting dalam mewujudkan target ini.

Untuk pencapaian keberhasilan program ini harus diikuti dengan kebijakan yang bertujuan membangun kesiapan petani agar mampu menerapkan berbagai inovasi teknologi. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sesuai mandatnya yaitu meningkatkan kualitas SDM Pertanian mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui **“Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu”** melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan.

Gerakan pemberdayaan petani terpadu merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dalam mendukung pencapaian sasaran Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas prioritas yang dirancang secara sistematis dan komprehensif dari aspek pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang kesemuanya bermuara pada pemberdayaan petani agar mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan teknologi yang terekomendasi guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas dalam satuan kawasan berbasis kelembagaan petani.(Cha)





## **PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN DAN PENGEMUDI**



**T**atausaha dan rumahtangga merupakan bagian penting terdapat dalam setiap organisasi dalam menunjang kelancaran dan terpenuhinya tujuan organisasi. Dalam hal pelayanan, ketatausahaan dan rumahtangga ini didukung dengan petugas keamanan dan pengemudi yang mempunyai tugas untuk melayani kebutuhan akan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, dan kelancaran operasional transportasi pimpinan dan pegawai guna mendukung kelangsungan tugas unit kerja organisasi secara efisien dan efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, satuan pengamanan dan pengemudi pada dasarnya merupakan jabatan strategis karena memiliki peranan yang tidak kecil dalam mendukung kelangsungan tugas organisasi. Sehingga kita jangan pernah menganggap kecil peran satpam dan pengemudi. Setiap tamu yang datang ke wilayah kerja atau kantor pasti melewati satpam terlebih dahulu, dimana sikap dan pengetahuan seorang satpam dalam memberikan pelayanan dan informasi yang akurat sangat berpengaruh dalam membangun citra positif unit organisasi. Begitu juga dengan pengemudi, pengemudi yang baik dan profesional ini sangat dibutuhkan dalam mempercepat kelancaran tugas organisasi secara optimal.

Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), melalui Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum Sekretariat Badan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Satuan Pengamanan dan Pengemudi. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga (3) hari mulai tanggal 7 s.d 9 Januari 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan di bidang tatausaha dan

kerumahtangaan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan satuan pengaman dan pengemudi lingkup BPPSDMP dalam melaksanakan tugas secara professional.





## Lanjutan Halaman 5

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi dan dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari seluruh satuan pengaman dan pengemudi di lingkungan BPPSDMP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pengelola ketatausahaan dan rumahtangga khususnya dibidang keamanan dan transportasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian sehingga pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangaan di Bidang Keamanan dan transportasi lingkup BPPSDMP dapat berjalan yang tertib, efektif dan efisien.

Untuk mendukung hal tersebut, maka dalam kegiatan pembinaan satuan pengaman dan pengemudi ini memberikan materi yang menyangkut yaitu antara lain : (1) Dinamika kelompok; (2) Pembinaan mental; (3) pembinaan kerohanian; (4) Peningkatan motivasi dan kinerja pegawai; (5) Budaya kerja lingkup kementerian Pertanian; (6) Disiplin PNS; (7) Membangun solidaritas, kebersamaan dalam melaksanakan tugas; (8) menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

Selain di PPMKP, pemberian materi pun dilakukan di kantor pusat BPPSDMP Jakarta. Hal ini bertujuan agar peserta yang berasal dari UPT lingkup BPPSDMP khususnya dapat mengetahui keberadaan wilayah kerja kantor pusat BPPSDMP secara lengkap. Sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan di tempat kerja masing-masing.





## Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPTT) Optimalisasi Peran Penyuluhan Dalam Pendampingan Program Swasembada Pangan di Tingkat BP3K dan WKPP



***“Peran Penyuluh Pertanian dalam GPTT sangat penting terutama untuk memotivasi, mendampingi dan mengawal petani yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani (poktan dan gapoktan) untuk menerapkan inovasi-inovasi teknologi guna melaksanakan kegiatan peningkatan produksi 7 komoditas pangan strategis nasional”***

**A**rah kebijakan Pembangunan Pertanian tahun 2015-2019 ditetapkan dalam kerangka mencapai kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk mendukung tercapainya kemandirian pangan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan sentra produksi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan, meliputi 8 (delapan) komoditas strategis nasional yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, cabai, bawang merah dan sapi potong.

Guna mewujudkan kemandirian pangan secara nasional, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang merupakan bagian Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan program Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPTT) melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu merupakan bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas melalui aspek

pelatihan, pendidikan dan penyuluhan. Tujuan akhir yang diharapkan dari GPTT ini adalah pemberdayaan petani agar mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan teknologi yang terekomendasi, guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas.

Dalam pelaksanaan GPTT, Penyuluh Pertanian memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memotivasi, mendampingi dan mengawal petani (kelompok tani) dalam penerapan inovasi teknologi. Upaya tersebut dilaksanakan di Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang berada di tingkat Provinsi.

Di Bakorluh, peran penyuluh dioptimalkan dalam kegiatan pengawalan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) pengawalan penyuluhan dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Bapelluh). Di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tingkat kecamatan diupayakan melalui pemberdayaan kelompok tani di sentra produksi bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP serta penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Swadaya.



Sementara itu dukungan GPTT melalui kegiatan penyuluhan masing-masing komoditas padi, jagung, kedelai, tenak sapi, tebu, bawang merah dilakukan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, Petani, Kelompok Tani dan Kelembagaan BP3K. Untuk memenuhi peningkatan produksi dan produktivitas 7 komoditas tersebut jumlah penyuluh yang diharapkan adalah sebanyak 24 ribu orang, Penyuluh Swadaya 10 ribu orang, Kelompok Tani 232 ribu orang, Petani 6.960.000 orang, dan BP3K sebanyak 2.600 unit.

Dengan adanya program Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru kejayaan sektor pertanian Indonesia. Selain itu dengan adanya program GPTT ini nantinya dapat mengembalikan martabat petani sebagai pelaku utama dalam mewujudkan swasembada pangan untuk menuju kedaulatan dan kemandirian pangan. (tri)





# STPP MALANG

## Lembaga pendidikan Pertanian dengan Sistem Pendidikan “Credit Earning System” (CES) dan pola pembelajaran “In and Out Campus Learning System”.

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya berprofesi di bidang pertanian. Didukung dengan iklim tropis dan kekayaan alam yang melimpah pertanian menjadi jantung perekonomian di Indonesia. Posisi strategis tersebut dibuktikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap devisa negara yang cukup besar. Semua itu tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang dalam pengolahan dan pengelolaan yang menentukan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang handal dibidang pertanian.)

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang merupakan salah satu pendidikan tinggi kedinasan di lingkup Kementerian Pertanian yang mendidik para tenaga fungsional pertanian, aparat pertanian, petani serta pegawai perusahaan pertanian pada jenjang pendidikan program Diploma IV Penyuluhan Pertanian. Dimana secara akademis, pembinaan STPP Malang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian.

Sebagai lembaga pendidikan kedinasan di Kementerian Pertanian yang berperan dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mendukung upaya revitalisasi penyuluhan pertanian, STPP Malang menerapkan sistem pendidikan “Credit Earning System” (CES) dan pola pembelajaran yang menggunakan “In and Out Campus Learning System”. Melalui CES siswa yang telah memperoleh sertifikat kompetensi pada setiap tingkatan diperkenankan mengambil cuti kuliah untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya masing-masing dan dapat melanjutkan kembali pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST) dibidang penyuluhan pertanian. Sedangkan “In and Out Campus Learning System” maksudnya siswa dapat menempuh proses pendidikan di dalam kampus (*In Campus*) dan pada situasi nyata di luar kampus (*Out Campus*). Dengan sistem tersebut diharapkan STPP Malang dapat menjadi salah satu pelopor dalam mendukung program revitalisasi penyuluhan pertanian dan dapat meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian.

Keberadaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang tidak terlepas dari adanya Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Malang, Sekolah Usaha Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) Negeri Malang dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sidoarjo. Dengan Surat Persetujuan Dirjen Dikti (Depdikbud) No. 2245/D/Q/1986, tertanggal 8 Desember 1986 dan SK Menteri Pertanian No. 1/Kpts/DI.210/I/1987, maka ketiga sekolah tersebut masing-masing, SPMA, menjadi Diklat APP Penyuluhan Pertanian (APP) Tanjung di Tanjung, Malang; SNAKMA menjadi Diklat APP Penanggungungan di Penanggungungan, Malang dan SUPM menjadi Diklat

APP Sedati di Sedati Sidoarjo. Kemudian berdasarkan SK Mendikbud No. 09.a/D/1990 tertanggal 6 Pebruari 1990, ketiga APP tersebut bergabung menjadi satu Diklat APP Malang dengan Seksi Lapangan I di Tanjung, Seksi Lapangan II di Penanggungungan, dan Seksi Lapangan III di Sedati. Dengan adanya UU No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 129/Kpts/OT.210/2/93 tanggal 25 Pebruari 1993, Diklat APP Malang menjadi Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Malang dengan Jurusan Penyuluhan Pertanian di Tanjung, Malang; Jurusan Penyuluhan Peternakan di Penanggungungan, Malang; Jurusan Penyuluhan Perikanan di Sedati, Sidoarjo.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian dan kemajuan teknologi komunikasi dan budidaya, maka APP Malang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 50 tahun 2002 status kelembagaannya meningkat menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang yang terdiri dari 2 program studi yaitu Penyuluhan pertanian dan pernyuluhan peternakan. Dengan memperhatikan tujuan pendidikan, tugas pokok dan fungsi serta rencana strategis pembangunan pertanian, maka visi STPP Malang adalah Terwujudnya STPP Malang sebagai salah satu pusat unggulan pendidikan tinggi pertanian yang menghasilkan sumberdaya manusia pertanian professional, memiliki integritas moral, sikap mental dan etos kerja tinggi.

Untuk itu lulusan STPP Malang perlu memiliki kompetensi diantaranya : (1) Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penyuluhan, pertanian/peternakan dan sosial ekonomi pertanian/peternakan, termasuk di dalamnya kegiatan pengkajian, perancangan dan pengembangan penyuluhan di bidang pertanian/peternakan; (2) Terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi penyuluhan, pertanian/peternakan dan sosial ekonomi pertanian/peternakan untuk bekal bertindak sebagai penyuluh pertanian/peternakan profesional, terutama teknologi sepadan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta mampu mengantisipasi dinamika permasalahan yang akan datang; (3) Mampu mengembangkan sikap sebagai penyuluh pertanian/peternakan profesional yang dilandasi oleh kompetensi penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan di bidang pertanian/peternakan dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat, norma-norma dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat; dan (4) Mampu memahami nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat agar dapat membawakan diri dalam kehidupan yang kondusif, sehingga tugas-tugas fungsional penyuluhan di bidang pertanian/peternakan dapat tercapai.



## “ON THE JOB TRAINING (OJT,) PILIHAN STRATEGIS SUKSESKAN GPPT”

Sumber daya manusia pertanian memegang peran penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan pertanian di seluruh pelosok Indonesia. Elemen sumber daya manusia pertanian yang terdiri aparatur dan non aparatur pertanian menjadi asset esensial untuk menggerakkan masyarakat pertanian di pedesaan dalam mewujudkan capaian sasaran produksi komoditas pertanian strategis nasional yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pertanian lima tahun kedepan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan sebelas arah kebijakan Pembangunan Pertanian tahun 2015 2019 dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Guna mendukung tercapainya kemandirian pangan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia pertanian pada kawasan sentra produksi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang meliputi 7 komoditas strategis nasional yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, cabai, bawang merah dan sapi potong. Sumberdaya manusia yang dimaksud salah satunya adalah Penyuluh Pertanian.

Penyuluh sebagai pilar utama dalam pembangunan pertanian, hal ini yang menjadikan alasan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Pelatihan Pertanian mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian yang salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan diklat secara terstruktur dan

tematik yaitu *On The Job Training (OJT)* yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutan (BP3K). Langkah ini merupakan pilihan strategis dalam mensukseskan gerakan program pemberdayaan petani terpadu. Metode diklat secara *On The Job Training (OJT)* di BP3K tidak hanya mengukur output pelatihan saja tetapi juga mengukur outcome. Rekapitulasi outcome pada suatu wilayah/hamparan dapat menjadi bahan *show of force* BPPSDMP dalam mendukung pencapaian target swasembada 7 komoditas strategis.





Substansi diklat tematik harus mampu mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh tiap Eselon I teknis lingkup Kementerian Pertanian yang telah dirumuskan dalam lokakarya “Penyiapan Sumberdaya Manusia Mendukung GPPT”. Pelaksanaan OJT dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alternatif disesuaikan dengan kondisi lapangan dan diselesaikan sebelum musim tanam April s.d September 2016. Model pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan kesesuaian materi, metode dan inovasi sesuai yang dibutuhkan oleh peserta.

Selain diharapkan berdampak terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sumberdaya manusia pertanian, tetapi juga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap tersedianya bahan konsumsi bagi masyarakat, tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. (Cha)



